

BAB I

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai rumah bagi manusia maupun makhluk dengan spesies yang berbeda untuk berkembang biak dan hidup, beraktivitas dan berinteraksi. Melalui hubungan ini, hubungan timbal balik terjadi, khususnya dengan peran signifikan masyarakat dalam ekosistem. Maka alam sekitar merupakan medium bagi semua makhluk untuk menghadapi sebuah kehidupan dan membangun hubungan yang saling membutuhkan.¹ Interaksi antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki sebuah aturan yang jika dilanggar dapat dikenakan sanksi. Dalam menghadapi permasalahan yang ada pada lingkungan, sistem aturan atau norma masyarakat mempunyai peran penting dalam mengelola interaksi dan sudut pandang yang terkait dengan lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan dinamika masalah lingkungan, dimana terdapat tantangan pada kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup mempunyai tantangan yang sangat kompleks dan jelas, serta memerlukan pengawasan lebih oleh pemerintah dalam hal perumusan kebijakan, penegakan hukum dan koordinasi antar instansi. Pencemaran lingkungan ialah permasalahan kompleks serta mempunyai dampak yang berhubungan dengan kesehatan manusia dan ekosistem sekitarnya. Kerusakan ekosistem seringkali terkait dengan aktivitas manusia, sementara manusia berharap hidup tanpa polusi atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh hal – hal yang tidak bisa dihindarkan.

¹ Wisnu Arya Wardhana, *Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995, hal.11.

Hukum lingkungan berperan penting dalam mengendalikan tindakan manusia terhadap lingkungan. Tanpa pengaturan ini, manusia dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Meski karena bencana alam seperti gempa dan banjir dapat merusak lingkungan, sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi karena manusia memasukkan bahan atau energy ke dalam lingkungan, berakibat turunnya kualitasnya serta merusak fungsinya lingkungan hidup sesuai dengan tujuannya.² Pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada kehidupan saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan dimasa depan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh – sungguh dan konsisten oleh semua pihak terkait. Negara harus mencegah hal – hal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi disebabkan oleh tangan manusia tetapi faktor alam juga menjadi penentu kerusakan lingkungan terjadi. Contohnya kerusakan lingkungan yang bisa terjadi karena adanya pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah salah satu fenomena alam yang paling menarik dan penting yang terjadi di bumi. Fenomena ini terjadi sebagai akibat dari gaya tarik menarik antara bumi, bulan dan matahari. Pasang surut tidak hanya memiliki dampak signifikan pada ekologi dan geologi pesisir, tetapi juga mempengaruhi kehidupan manusia terutama mereka yang tinggal di daerah pesisir .

Pasang surut air laut juga merupakan perubahan periodic dalam tinggi permukaan laut yang terjadi secara berkala. Fenomena ini menyebabkan air laut

² Deni Syaputra, Peran serta masyarakat dan kewenangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, Menara Ilmu XI, Yogyakarta, 2017, hal.45.

naik dan turun secara teratur sepanjang hari. Pasang surut air laut memiliki dua fase utama, pasang (air naik) dan surut (air turun).

Faktor – faktor yang mempengaruhi pasang surut air laut antara lain adalah:

1. Gravitasi Bulan Dan Matahari : Gaya tarik bulan adalah faktor utama yang mempengaruhi pasang surut air laut. Bulan menarik air di arahnya, menyebabkan air laut naik kecil yang disebut pasang. Disisi lain bumi yang berlawanan dari bulan, terbentuk surut karena tarikan lebih lemah ini. Matahari juga memiliki pengaruh pada pasang surut meskipun kurang signifikan dibandingkan dengan bulan.
2. Bentuk pantai dan lautan : Bentuk pantai, lebar mulut sungai dan kedalaman lautan juga mempengaruhi besarnya pasang surut di suatu wilayah. Di pesisir yang sempit dan dalam, perubahan tinggi air laut bisa sangat dramatis. Sebaliknya, di wilayah yang lebih lebar dan dangkal, perubahan mungkin kurang terasa.
3. Topografi Lautan : Topografi dasar lautan, seperti terumbu karang, pulau dan gundukan bawah laut juga dapat mempengaruhi pola pasang surut local dengan mempengaruhi aliran air laut.

Pasang surut air laut juga memberikan beberapa dampak pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup, diantaranya adalah :

1. ekologi pesisir : Pasang surut adalah habitat bagi berbagai jenis organisme laut. Hewan – hewan seperti kepiting, tiram, dan burung pesisir sangat bergantung pada perubahan air laut ini untuk mencari makan dan berkembang biak.

2. Transportasi dan Navigasi : pasang surut air laut mempengaruhi navigasi kapal di perairan pesisir. Kapal – kapal besar mungkin mengalami kesulitan saat pasang surut rendah, sementara kapal – kapal kecil mungkin terhalang oleh pasang surut tinggi.
3. energy terbarukan : beberapa pembangkit listrik tenaga air dan energy pasang surut mengambil keuntungan dari perubahan air laut untuk menghasilkan listrik.
4. potensi bencana : pasang surut tinggi bisa menjadi faktor yang berkontribusi pada bencana banjir pesisir. Kombinasi pasang surut tinggi dan badai tropis dapat mengakibatkan banjir pesisir yang merusak.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pasang surut air laut salah satunya terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tungkal ilir merupakan daerah yang mengalami kenaikan air laut pada saat pergantian siang dan malam. Cuaca seperti musim hujan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan volume air laut di daerah ini.

Ketika air pasang, air dari laut menguap masuk ke daratan, hal ini menyebabkan beberapa akses jalanan di Kabupaten Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertutup air. Hal ini tentunya memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan ekosistem yang berada disekitarnya. Air yang masuk ke daratan akibat pasang dari laut juga tak jarang membawa sampah – sampah dan menyebar ke sekeliling daerah yang berdampak.

Masuknya air ke permukaan daratan yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir tentunya menimbulkan kerusakan lingkungan. Air yang masuk membawa sampah,

tertutupnya akses jalan karena banjir dan ini juga menyebabkan kendaraan masyarakat rusak serta menyebabkan karatan akibat terkena air laut. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang serius, mengingat pasang surut air laut tak jarang terjadi dan bisa diperkirakan jadwalnya. Penanganan pencegahan kerusakan lingkungan tentunya harus melibatkan pihak masyarakat dan pemerintah setempat agar bisa ditangani dampaknya dengan efektif.

Dengan melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Bapeda dan Dinas Lingkungan serta didukung oleh pihak – pihak lain, penanganan akibat pasang surut air laut bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa adanya hambatan akibat air yang masuk ke daratan dan pemukiman.

Hasil penelitian yang mengkaji peran pemerintah daerah sangat beragam, dan penelitian tersebut berasal dari berbagai sumber dan tempat penelitian. Berikut ini adalah beberapa rangkuman penelitian tersebut:

Penelitian Erwin (2014) “Tingkat Pencemaran Pada Saat Pasang Dan Surut Di Perairan Pantai Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi pada saat pasang dan surut di perairan pantai kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di perairan pantai Kota Makassar pada bulan Agustus 2013. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak tiga kali pada saat air pasang dan surut. Analisa data dalam penelitian ini diolah secara deskriptif dengan menentukan tingkat pencemaran relative terhadap parameter kualitas air yang diizinkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003, dengan mengacu pada rumus Numerow. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi

informasi bagi pemerintah setempat dalam pengemabnagan wilayah pantai dan meminimalisir faktor kerusakan lingkungan hidup akibat pasang surut air laut.

Penelitian Akhmad Mualif Alufi (2017) “Pengaruh Banjir Pasang Air Laut Terhadap Kualitas Lingkungan Pemukiman Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”. Menunjukkan bahwa banjir akibat pasang air laut membuat masyarakat melakukan penyesuaian fisik rumah berbeda dengan fisik rumah pada umumnya. Penyesuaian tersebut dapat berupa peninggian rumah menjadi bentuk panggung atau peninggian lantai rumah dengan tujuan agar air dari banjir pasang laut tersebut tidak masuk ke dalam rumah. Faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dari pemerintah merupakan faktor yang memiliki kontribusi besar dalam pengaruh kualitas lingkungan pemukiman. Faktor ekonomi menjadi faktor dominan karena berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemulihan atau perbaikan rumah yang dilakukan karena banjir pasang air laut yang terjadi. Ada beberapa perbedaan standart penilaian kualitas permukiman antara daerah yang terkena banjir dengan daerah yang tidak terkena banjir pasang air laut.

Penelitian Febriana Restu Kusumaningsih (2017) “Dampak Banjir Pasang Surut Terhadap Masyarakat Pesisir Di Kota Semarang”. Menunjukkan bahwa banjir pasang surut di Kota Semarang disebabkan oleh kombinasi dari kenaikan muka air laut dan penurunan tanah sehingga penduduk harus dapat beradaptasi dengan banjir pasang surut. Dalam penelitian ini dikumpulkan informasi mengenai banjir pasang surut dan dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Peran pemerintah dalam upaya meminimalisir dampak lingkungan

juga diharapkan agar bisa berdampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk kawasan pesisir kota Semarang.

Penelitian Rihandhi Evmibahapsa Yusma (2025) “Kelimpahan Dan Distribusi Mikroplastik Pada Air Dan Sedimen Akibat Pengaruh Pasang Surut Di Kuala Tungkal”. Di daerah pasang surut seperti Kuala Tungkal sampah plastic yang terbawa ke laut sering kali kembali ke daratan bersama air pasang dan mengendap bersama sedimen. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kelimpahan mikroplastik pada air dan sedimen di wilayah pasang surut air laut Kuala Tungkal. Penelitian dilakukan di Sungai Gompong sampai pelabuhan Roro Kuala Tungkal.

Penelitian Tri Eko Manda Putra (2023) “ Pengaruh Sedimen Terhadap Hambatan Arus Sungai Pada Pasang Surut Di Jalan Kampung Laut Kuala Tungkal”. Menunjukkan banjir saat ini sering dimanfaatkan sebagai lahan tempat tinggal oleh penduduk sehingga menyulitkan untuk menanggulangi permasalahan pengaliran air pada beberapa wilayah yang merupakan aliran air alami. Pada umumnya banjir diperkotaan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya curah hujan tinggi, pengaruh fisografi, erosi dan sedimentasi pada saluran, pendangkalan sungai, kapasitas drainase yang kurang memadai, kawasan kumuh, sampah, alih fungsi lahan dan perencanaan penanggulangan banjir yang tidak tepat.

Ada beberapa kesamaan dengan uraian kajian terdahulu, seperti keterlibatan pemerintah dan penyebab kerusakan lingkungannya. Permasalahan dan upaya pemerintah dalam menangani pasang surut air laut di daerah Tanjung Jabung Barat, belum pernah diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memilih untuk menguji hipotesis kerja berdasarkan temuan-temuan tersebut. Selain itu, di

Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, peneliti akan mengamati upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi kerusakan lingkungan saat air pasang surut sekaligus mengatasi kendala yang menghambatnya. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI DAN MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN SAAT AIR PASANG SURUT DI DAERAH TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT”** untuk laporan penelitiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah penelitian yang disusun oleh peneliti berdasarkan latar belakang yang telah diberikan:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi dan mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Daerah Dalam Mengatasi dan Mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Untuk Menggambarkan dan Menganalisis Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi dan Mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Mengatasi dan Mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut di daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah uraian beberapa keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya di lingkungan birokrasi yang berkepentingan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Di Desa Pangkal Babu, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penelitian ini dapat membantu Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi dan mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Untuk membantu Pemerintah Daerah di Desa Pangkal Babu, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Mengatasi dan mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.5 Landasan Teori

1. Peran Pemerintah

"Peran" berasal dari kata "kedudukan". Kedudukan mengacu pada tingkat di mana anggota masyarakat diyakini memiliki pengaruh sosial yang signifikan. Salah satu tugas utama yang perlu dilakukan adalah memenuhi peran seseorang³. Status sosial seseorang dalam masyarakat membentuk orientasi atau gagasan tentang perannya, menurut Riyadi. Yang terpenting adalah orang tersebut dan motivasi mereka di balik tindakan yang diinginkan⁴.

Peran (status) bersifat dinamis, dan posisi merupakan bagian darinya. Untuk memenuhi suatu posisi, seseorang harus menjalankan hak istimewa dan tanggung jawab yang menyertainya. Terkait dengan bidang-bidang yang diberikan warga negara kepada kita, tugas kita adalah memastikan bahwa kita memanfaatkannya dengan baik. Orang dalam posisi ini memiliki kekuatan untuk memengaruhi sikap orang lain karena mereka secara konsisten mematuhi norma-norma yang ditetapkan, dan hubungan sosial di antara warga negara berfungsi sebagai penghubung antara berbagai peran yang dimainkan individu dalam komunitas mereka⁵.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, Hal. 845

⁴ Susi Iswanti dan Zulkarnaini, "*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais*", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2022, hlm. 94.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hlm. 845

Ada tiga bagian dalam suatu peran, yaitu:

1. Konsep peran mengacu pada rasa kewajiban individu dalam keadaan tertentu.
2. Karena seseorang memiliki posisi tertentu, orang memiliki harapan tertentu tentang bagaimana ia harus bertindak.
3. "Pelaksanaan peran" mengacu pada bagaimana seorang individu benar-benar bertindak sesuai dengan peran yang diberikan kepada mereka.

Jika ketiganya sinkron, komunikasi antara orang-orang mengalir dengan mudah dan tanpa gangguan. Sudut pandang ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan tanggung jawab berikut:

- a). Pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam interaksi sosial tertentu dikenal sebagai perannya.
- b). Dampak seseorang tumbuh sebanding dengan perannya dalam masyarakat.
- c). etika seseorang bertindak sesuai dengan kedudukannya, ia mengemban peran.
- d). Peran dimainkan ketika kesempatan muncul dan tindakan diambil⁶.

Bagian integral dari setiap negara adalah pemerintahannya, yang bertugas menetapkan kebijakan dan mengarahkan lembaga-lembaganya untuk mencapai tujuan bersama⁷. Pemerintah terdiri dari semua mesin dan alat yang digunakan oleh negara untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya. Merupakan

⁶ *Ibid*, hlm. 925

⁷ Inu Kencana Syafie, "*Ilmu Pemerintahan*", Bandung, Bandar Maju, 2013, hlm. 124.

tanggung jawab pemerintah daerah untuk menumbuhkan potensi pariwisata di daerahnya masing-masing, menurut penerapan teori multi- bagian Pitana Gayatri (2005) tentang peran pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata dalam penelitian ini.

1) Pemerintah Sebagai Motivator

Dalam karyanya tahun 2009, Mudjono berpendapat bahwa istilah "motivator" mengacu pada "dorongan mental" yang mengendalikan dan mengarahkan perilaku manusia.

Peran pemerintah sebagai motivator merujuk pada fungsi pemerintah dalam mendorong, memotivasi, dan menginspirasi masyarakat, lembaga, dan sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya sebagai pengatur dan pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak semangat dan penumbuh inisiatif.

2) Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dalam upaya meningkatkan potensi pariwisata di wilayah otonominya, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan segala fasilitas yang diperlukan. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, proses pembangunan, prosedur perencanaan yang lebih baik, dan penetapan. Untuk memaksimalkan pembangunan daerah, pemerintah sebagai fasilitator bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang mendukung pelaksanaan proyek pembangunan yang mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat. Pelatihan, pendidikan, dan peningkatan

keterampilan termasuk dalam kategori "bantuan", sedangkan uang dan modal ditangani oleh pemerintah melalui program bantuan modal.

3) Pemerintah Sebagai Dinamisator

Menurut prinsip tata kelola yang baik, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah perlu bekerja sama secara efektif agar pertumbuhan optimal dapat terjadi. Perlu adanya koordinasi antara ketiga kelompok tersebut agar industri pariwisata dapat berkembang, dan pemerintah daerah sebagai pihak yang berkepentingan dapat berperan untuk mewujudkannya⁸.

2 . Kebijakan Publik

Menelaah konsep kebijakan atau yang sering kita dengar sebagai "policy" dalam bahasa Inggris perlu dilakukan sebelum membahas lebih jauh tentang gagasan kebijakan publik. Kebijakan suatu organisasi atau pemerintah merupakan serangkaian prinsip dan gagasan yang menjadi pedoman untuk melaksanakan misi dan mencapai tujuannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁹. Suatu upaya untuk mencapai tujuan melalui penetapan nilai, tujuan, prinsip, dan prosedur manajemen.

Dalam konteks tertentu dengan kemungkinan dan tantangan untuk mencapai implementasi kebijakan, Carl J. Frederick berpendapat bahwa kebijakan paling baik dipahami sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh individu, organisasi, atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

⁸ Susi Iswanti dan Zulkarnaini, "*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais*", Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2022, hlm.94.

⁹ *Ibid*, Hlm.112

sebelumnya. Komponen utama dari konsep kebijakan, menurut sudut pandang ini, adalah perilaku yang dimaksudkan dan bertujuan; lagipula, kebijakan lebih tentang menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang direkomendasikan dalam berbagai tindakan yang berkaitan dengan suatu masalah¹⁰.

Ada kemungkinan kebijakan tidak dimaksudkan, tetapi tetap saja diberlakukan melalui praktik administratif. Latar belakang historis juga diperlukan untuk memahami definisi kata kebijakan. Kebijakan yang dinamis ini mengungkapkan praktik kebijakannya yang berubah-ubah, seperti halnya gagasan publik. Sederhananya, implementasi kebijakan hanyalah sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan untuk melaksanakan kebijakan publik: memberlakukan kebijakan itu sendiri sebagai suatu program atau membuat kebijakan baru yang dibangun di atas kebijakan yang sudah ada.

a. Keberhasilan Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Ada empat faktor yang memengaruhi metrik yang menentukan bagaimana kebijakan diterapkan¹¹ yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Pencapaian tujuan implementasi kebijakan masyarakat, yang memungkinkan para pelaksana membuat keputusan yang tepat. Untuk

¹⁰Primas Anindyajati, dkk. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Bentuk Kebijakan Publik*. (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan) Vol 7 No 2 Tahun 2019

¹¹ Primas Anindyajati, dkk. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Bentuk Kebijakan Publik*. (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan) Vol 7 No 2 Tahun 2019

mengurangi distorsi implementasi, tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada audiens yang dituju. Informasi akan menjadi kacau jika penerima yang dituju tidak jelas tentang tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, di dalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

3. Disposisi (Kecenderungan-Kecenderungan)

Misalnya, pengabdian, kejujuran, dan temperamen demokratis seseorang adalah contoh watak. Sejauh yang diinginkan pembuat kebijakan, kebijakan akan diimplementasikan secara efektif oleh pelaksana jika ia memiliki watak positif. Proses implementasi kebijakan juga gagal menjadi kebijakan ketika orang yang melaksanakannya memiliki kepribadian atau sudut pandang yang berbeda dari orang yang membuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan kurang lebih dilaksanakan tergantung pada struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Kehadiran prosedur operasi standar merupakan komponen penting dari setiap struktur organisasi. Prosedur ini berfungsi sebagai peta jalan bagi semua karyawan untuk diikuti saat mengambil tindakan. Karena organisasi tidak aktif, hal ini muncul sebagai reaksi internal terhadap keterbatasan waktu pelaksana dan keinginan untuk konsistensi dalam pekerjaan organisasi yang besar dan rumit.

b. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Di antara banyak langkah yang terlibat dalam merumuskan kebijakan adalah :

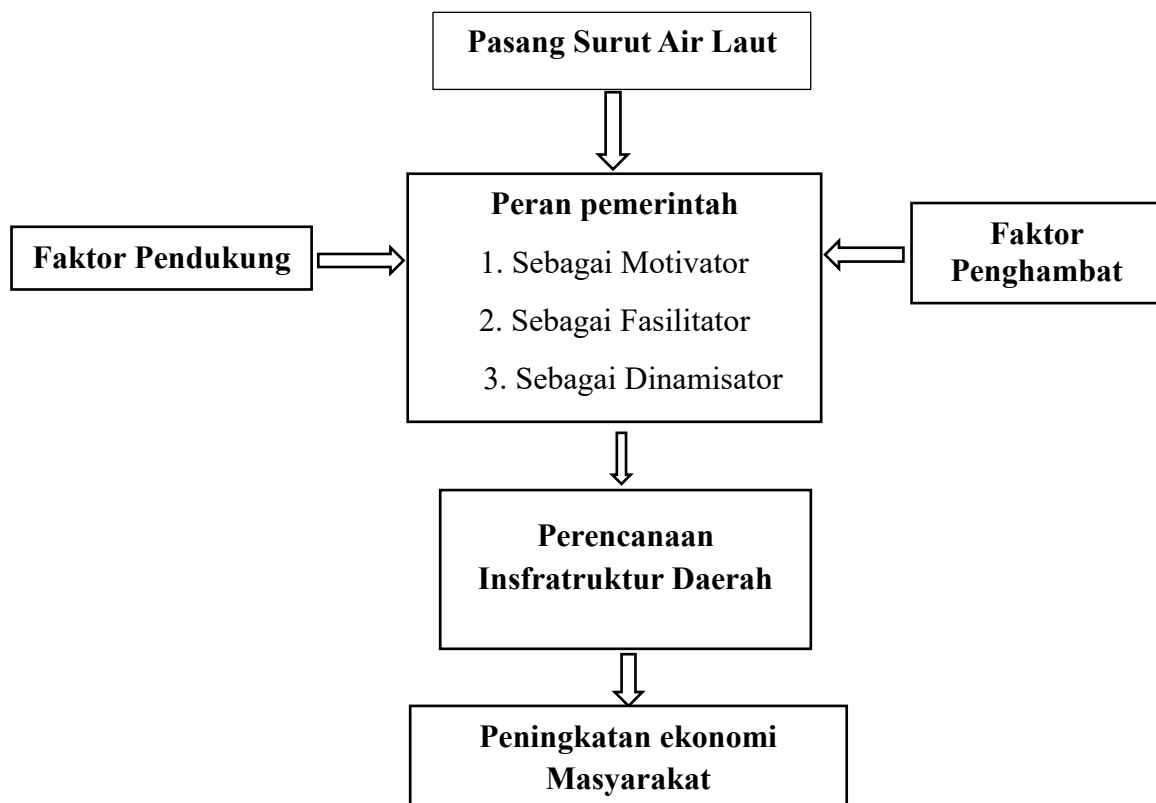
1. Membuat Rencana Untuk Agenda Kebijakan.
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan ¹².

1.6 Kerangka Berpikir

Salah satu cara untuk menggambarkan hubungan timbal balik antara berbagai variabel adalah melalui kerangka berpikir konseptual. Berdasarkan fakta-fakta di lokasi penelitian, kebutuhan peneliti dapat menginformasikan penjelasan

¹²Primas Anindyajati, dkk. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Bentuk Kebijakan Publik*. (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan) Vol 7 No 2 Tahun 2019

singkat tentang kerangka berpikir, yang berfungsi sebagai alur pemikiran untuk penelitian dalam penelitian kualitatif. Berikut adalah bagaimana penelitian ini terstruktur:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Penelitian Kualitatif, merupakan jenis penelitian yang akan memperoleh data deskriptif seperti kalimat-kalimat yang tertulis maupun secara lisan dari perilaku atau orang- orang yang akan di amati. Antara lain tjuan dari penelitian kualitatif ialah untuk menjelaskan suatu fenomenadengan sedalam-dalamnyadengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang akan di teliti¹³.

Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat bagaimana peran pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengelolaan wisata hutan mangrove. Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu faktor-faktor dan peran pemerintah dalam mendeskripsikan kausus sosial yang ada pada masyarakat sekitar tempat wisata pasang surut air laut berada.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kuala Tungkal, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peneliti mengambil penelitian tentang peran serta strategi pemerintah daerah dalam mengatasi dan mengurangi kerusakan lingkungan saat air pasang surut di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7.3 Fokus Penelitian

¹³ Lexi J. Moleong. *“Metodelogi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi”*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hlm.78

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi dan mengurangi kerusakan lingkungan saat air pasang surut di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara khusus, penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang menghambat dalam adanya air pasang surut ini untuk berkembang di masa mendatang dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi Dampak Air Pasang surut di Kabupaten Tanjung jabung Barat secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis dan empiris.

1.7.4 Sumber Data

a. Data Primer

Istilah "data primer" mengacu pada informasi yang dikumpulkan di lapangan dari sumber asli¹⁴. Data utama untuk penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi karena merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti adalah alat penelitiannya. Di sini, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan isu utama penelitian.

b. Data Sekunder

Untuk melengkapi data primer yang dianggap relevan dengan penelitian primer, peneliti sering beralih ke sumber informasi sekunder. Dokumen, seperti catatan resmi dan buku yang ditemukan di perpustakaan, merupakan sumber utama

¹⁴ *Ibid*, hlm.80

data sekunder¹⁵. Meskipun data tersebut bersumber dari individu atau dokumen lain, data tersebut tetap dapat digunakan untuk mendukung sumber data primer.

Data informan dianalisis dan disusun oleh penulis. Saat memilih informan, peneliti mencari orang yang dapat memberikan informasi spesifik dan ringkas yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Peneliti dalam proyek ini juga menyertakan:

Tabel 1.1 Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama	Status
1	Bapak Budi	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH)
2	Ibu Nuraini	Fungsional Perencanaan Ahli Muda
3	Bapak azmi	Pengguna insfrastruktur (Masyarakat Kota Kuala Tungkal)
4	Bapak Toni	Pengguna Insfratruktur (Masyarakat Kuala Tungkal)
5	Rusti Siregar	Pemilik Lahan Padi (Masyarakat Tepian)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Op.cit

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan informasi adalah dengan melakukan wawancara, wawancara merupakan bentuk perjumpaan antara dua orang untuk berbagi sebuah informasi ataupun ide yang dapat dilakukan melalui tanya jawab, sehingga dapat diolah menjadi suatu makna dari setiap topik tertentu. Dalam hal ini, ada beberapa macam bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, serta tidak terstruktur.¹⁶

Jenis wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah model wawancara yang dilangsungkan secara leluasa dengan maksud agar jalannya wawancara dilakukan secara fleksibel.¹⁷

2. Dokumentasi

Membuat dokumentasi adalah cara yang bagus untuk mendukung pengumpulan lebih banyak data. Untuk menganalisis topik penelitian, teknik dokumentasi dapat digunakan dengan data yang relevan dengan masalah tersebut. Dokumentasi penelitian ini dapat berbentuk teks, audio, atau visual.

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu aktivitas pengamatan dalam pemuatan perhatian semua objek yang menggunakan semua panca indra.¹⁸ Pada penelitian ini,

¹⁶ Moleong, Lexy J. Op.cit., hlm.186.

¹⁷ Salim dan syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), Hlm. 119.

¹⁸ Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 234.

observasi digunakan untuk melihat kondisi langsung di lapangan yang mana lapangan tersebut bertempat di Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari tokoh mengenai permasalahan yang akan di bahas, dan data-data tersebut untuk menggambarkan dan menganalisis data.¹⁹

a. Pengumpulan data

Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah mengamati lokasi penelitian. Setelah itu, wawancara dengan informan penelitian dilakukan. Untuk mendukung temuan mereka, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data dari wawancara, peneliti fokus pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang muncul. Ini termasuk data yang berkaitan dengan penyediaan dan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.

c. Penyajian Data

yang merupakan serangkaian fakta terorganisir yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya.

¹⁹ Bagung Suyanto dan Sutina, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-5, hlm. 56

- d. Sketsa Bagian terakhir dari setiap proyek penelitian adalah kesimpulan. Makna, keteraturan pola penjelasan, dan alur sebab akibat dapat dipahami dengan lebih baik dengan bantuan kesimpulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini akan dibahas dalam simpulan, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.

1.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi adalah metode untuk memastikan keandalan data yang menggabungkan dua atau lebih sumber informasi. Penelitian ini menggunakan empat jenis triangulasi yang berbeda, yaitu:

- Triangulasi Data
- Triangulasi Penelitian
- Triangulasi teori
- Triangulasi Teknik Metodologis

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi data yaitu praktik memanfaatkan berbagai jenis data dalam suatu penelitian dan triangulasi teori yaitu praktik memanfaatkan berbagai perspektif dalam menafsirkan data untuk memastikan validitas data yang digunakan dalam penelitian²⁰.

²⁰ Ahmad Fauzi R, dkk. 2012. *Analisi Peran Pemerintah Daerah terhadap anak Putus sekolah di Kabupaten Wajo*. Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin.